

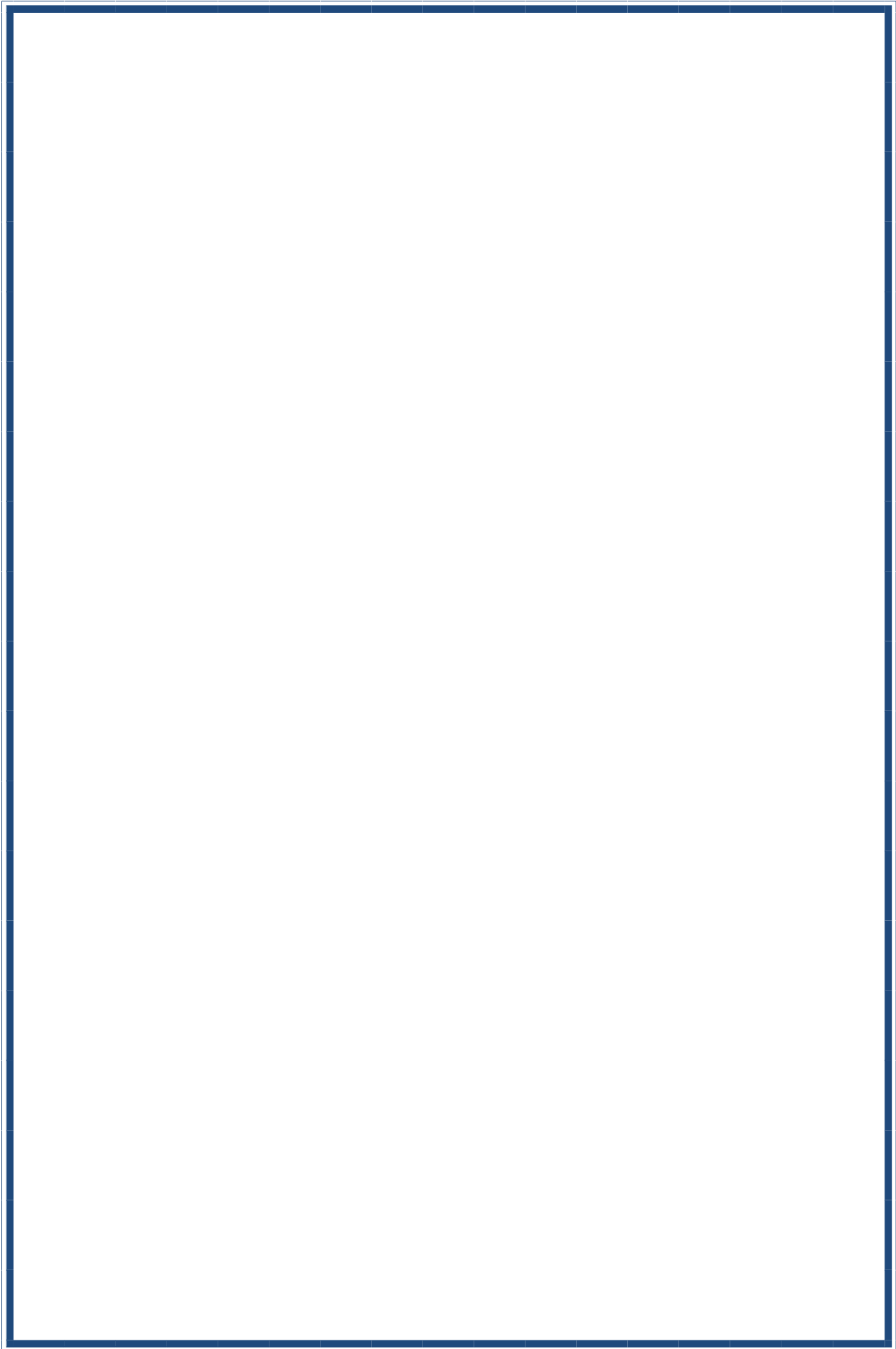


**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021**

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan atas limpahan rahmat dan hidayahNya, Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh Tahun 2021 telah dapat diselesaikan penyusunannya, Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota yang dituangkan dalam Strategi Pembangunan Daerah, sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan.

Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan arah, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh yang lebih berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan karena semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sudah mengaju pada Renstra.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Rencana Kerja ini banyak terdapat kekurangan baik menyangkut redaksinya maupun hasil pelaksanaan tugas, untuk itu bimbingan, saran dan kritik guna penyempurnaan lebih lanjut sangat kami harapkan.

Akhirnya diharapkan Rencana Kerja ini akan bermanfaat baik bagi organisasi kami maupun dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Kota Banda Aceh dan kepada semua pihak yang telah turut memberikan bantuan dalam penyelesaian penyusunan Rencana Kerja ini kami mengucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun lalu dan Capaian Renstra Disdukcapil	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh.....	17
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh	19
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	23
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh.....	24
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	24
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	31
BAB V PENUTUP	36
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang pedoman pelaksanaannya diatur pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Secara hierarki penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang di tempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat. Renja merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya.

Proses Penyusunan Renja di mulai dengan persiapan penyusunan pengumpulan data, pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Disdukcapil untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja tahun lalu, berdasarkan Renstra yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKP. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan pada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Keterkaitan Renja dengan dokumen RKP dan Renstra merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD, RKP. Renja merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra dan RPJMD bagi RKA SKPD, KUA PPAS dan RAPBD.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh Tahun 2021 disusun sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan untuk tahun 2021. Rencana kerja ini disusun dengan mempedomani Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2021.

1.1 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Renja Disdukcapil Kota Banda Aceh adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 2056 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1092):
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 8) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 14) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022;
- 15) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 – 2029;
- 16) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 17) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 103 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh 2021.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renja Disdukcapil Kota Banda Aceh Tahun 2021 adalah sebagai pedoman awal penyusunan perencanaan anggaran program dan kegiatan serta penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Disdukcapil Kota Banda Aceh .

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah :

- 1) Mereview capaian pelaksanaan kegiatan Disdukcapil Kota Banda Aceh tahun lalu dan kesesuaiannya dengan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK);
- 2) Menetapkan program dan kegiatan Disdukcapil Kota Banda Aceh; dan
- 3) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta evaluasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.4 Sistematika

Rencana Kerja Disdukcapil Kota Banda Aceh Tahun 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja, meliputi :

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPK, Renstra OPD,

dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBK.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), kewenangan Disdukcapil, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Disdukcapil.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Disdukcapil.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Disdukcapil Tahun Lalu dan Capaian Renstra Disdukcapil.

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disdukcapil tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBK tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Disdukcapil berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Disdukcapil tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disdukcapil tahun lalu, dan realisasi Renstra Disdukcapil mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Disdukcapil dan/atau realisasi APBK untuk Disdukcapil.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Disdukcapil

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Disdukcapil berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM,

maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disdukcapil

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Disdukcapil dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Disdukcapil
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Disdukcapil;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Disdukcapil.
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DISDUKCAPIL.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Disdukcapil.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Disdukcapil

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Disdukcapil yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Disdukcapil.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan

program, kegiatan dan sub kegiatan antara lain :

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah
- Pencapaian SDGs
- Pengentasan Kemiskinan
- Pencapaian NSPK dan SPM
- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain meliputi :

- Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan
- Sifat Penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan
- Total Kebutuhan dana/pagu indikatif yang di rinci menurut sumber pendanaannya

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISDUKCAPIL

Bab ini berisi tentang Rencana Kerja Pendanaan dan Kelompok sasaran Disdukcapil Kota Banda Aceh.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISDUKCAPIL TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Disdukcapil Tahun lalu dan Capaian Renstra Disdukcapil Kota Banda Aceh

Tujuan dilakukannya evaluasi adalah untuk menjamin keseimbangan program-program yang telah dilaksanakan sebelumnya yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, serta untuk melihat Program dan kegiatan sebelumnya yang perlu dilanjutkan pada tahun berikutnya yang membutuhkan program lainnya untuk menjamin kesinambungan pemanfaatan hasil program tersebut.

Evaluasi menitik beratkan pada aspek konsistensi program dan pelaksanaan kegiatan dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut Renja Disdukcapil Kota Banda Aceh ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran.

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran/hasil yang direncanakan: tahun 2019

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi keluaran/hasil yang direncanakan :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan Alat tulis Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan komponen instalasi/ penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Makanan dan minuman
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah

- Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/ Teknis Perkantoran

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

4. Program penataan Administrasi Kependudukan

- Pembangunan SIAK secara Terpadu
- Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
- Peningkatan Pelayanan publik dalam bidang Kependudukan
- Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Sipil
- Koordinasi Kerjasama Permasalahan Pencatatan Sipil
- Penataan Dokumentasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Penataan Data penduduk Lampid
- Peningkatan Pelayanan Publik
- Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan Data dengan Instansi/Lembaga

b. Realisasi program/kegiatan yang melebihi keluaran/hasil yang direncanakan;

Realisasi Program dan Kegiatan tahun 2019 tidak ada yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

c. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Hal ini disebabkan Karena adanya kebijakan dari Pemerintah Kota Banda Aceh anggaran Pengadaan Pakaian Dinas dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih mendesak.

d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah;

Implikasi dan manfaat yang timbul dari pencapaian target Renstra Disdukcapil yaitu meningkatnya capaian layanan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu : kepemilikan dokumen kependudukan (KK, KTP elektronik, KIA, Surat Keterangan Pindah Datang) dan dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan dokumen lainnya).

e. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut;

Untuk keberhasilan pencapaian program dilakukan perencanaan yang baik yang dituangkan dalam Renja, seperti pengusulan anggaran ke pemerintah agar mendapat luncluran dana tambahan ke daftar isian anggaran perangkat daerah dalam hal ini Disdukcapil Kota Banda Aceh. Sharing kegiatan antar dinas terkait sebagai penunjang kegiatan yang menitikberatkan di bidang Kependudukan. Selain kebijakan anggaran juga harus diperhatikan untuk peningkatan kualitas sumber daya aparatur dinas dengan cara melakukan pelatihan/diklat/pendidikan agar terampil dalam melaksanakan tugas demi lancarnya program yang telah direncanakan, dan meningkatkan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Membuat aturan dan regulasi baru daerah sebagai penunjang peraturan nasional yang dapat dituangkan dalam Qanun dan Perwal untuk mempertegas aturan-aturan hukum dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Disdukcapil Kota Banda Aceh pada tahun 2019 dan target tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh dan Pencapaian Renstra SKPD Sampai dengan
 Tahun Berjalan (2019) Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out come)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra SKPD tahun (akhir periode Renstra SKPD 2022	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018(Tahun n-3)	Target dan Realisasi kinerja program dan kegiatan SKPD tahun 2017 tahun lalu (n-2)			Target program dan Kegiatan Renja SKPD tahun (tahun n-1) 2020	Perkiraan realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d dengan tahun berjalan (2018)		Cat
					Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	(10)=(5+7+9)*	11 = (10/4)*	12
1	WAJIB										
1.10	BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
1.10.1.10.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100%								
1.10.1.10.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Jumlah waktu Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	60 bln	24 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	48 bln	80%	
1.10.1.10.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah waktu Jasa Kebersihan Kantor	60 bln	24 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	48 bln	80%	
1.10.1.10.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	291 Jenis	94 Jenis	56 Jenis	56 Jenis	100%	55 Jenis	205 Jenis	70.44%	
1.10.1.10.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak & Penggandaan yang disediakan	94 Jenis	38 Jenis	21 Jenis	21 Jenis	100%	21 Jenis	80 Jenis	85,10%	

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out come)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra SKPD tahun (akhir periode Renstra SKPD 2022)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018(Tahun n-3)	Target dan Realisasi kinerja program dan kegiatan SKPD tahun 2017 tahun lalu (n-2)			Target program dan Kegiatan Renja SKPD tahun (tahun n-1) 2020	Perkiraan realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d dengan tahun berjalan (2018)		Cat
					Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	(10)=(5+7+9)*	11 = (10/4)*	12
1.10.1.10.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	60 Jenis	23 Jenis	8 jenis	8 jenis	100%	13 Jenis	44 Jenis	73,3 3%	
1.10.1.10.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan	40 Jenis	11 Jenis	13 Jenis	13 Jenis	100%	22 Jenis	45 Jenis	77.82%	
1.10.1.10.01.01.17	Penyediaan Makan dan Minum	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman yang Disediakan	57.354 Porsi	21.780 Porsi	10.890 Porsi	10.890 Porsi	100%	11.132 Porsi	43.802 Porsi	76.37%	
1.10.1.10.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi keluar Daerah yang dilaksanakan	150 Laporan	60 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	100%	30 Laporan	120 Laporan	80%	
1.10.1.10.01.01.19	Penyediaan Jasa Pelelangan/ Pengadaan Barang	Jumlah Waktu Jasa Pelelangan?Pengadaan Barang Yang Disediakan	30 Bulan	12 Bulan	0	0	0%	Bulan	Bulan	40%	
1.10.1.10.01.01.20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor/ Teknis Perkantoran	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor/ Teknis Perkantoran yang Tersedia	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	48 Bulan	80.00%	

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra SKPD tahun (akhir periode Renstra SKPD 2022	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi kinerja program dan kegiatan SKPD tahun 2017 tahun lalu (n-2)			Target program dan Kegiatan Renja SKPD tahun (tahun n-1) 2020	Perkiraan realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d dengan tahun berjalan (2018)		Cat
					Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	(10)=(5+7+9)*	11 = (10/4)*	12
1.10.1.10.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang dilaksanakan	240 kali	96 Kali	48 Kali	48 Kali	100%	48 Kali	192 kali	80%	
1.10.1.10.01.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor yang dilaksanakan	560 kali	224 kali	112 Kali	112 Kali	100%	112 Kali	448 Kali	80%	
1.10.1.10.01.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparaturnya perangkat daerah									
1.10.1.10.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang disediakan	232 Stel	93 Stel	48 Stel	0	0%	47 Stel	140 Stel	60,34%	

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out come)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra SKPD tahun (akhir periode Renstra SKPD 2022)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi kinerja program dan kegiatan SKPD tahun 2017 tahun lalu (n-2)			Target program dan Kegiatan Renja SKPD tahun (tahun n-1) 2020	Perkiraan realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d dengan tahun berjalan (2018)		Cat
					Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	(10)=(5+7+9)*	11 = (10/4)*	12
1	WAJIB										
1.10	BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
1.10.1.10.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan										
1.10.1.10.01.15.01	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	Persentase Pembersihan data base kependudukan dan pengembangan aplikasi	95%	0%	95%	95%	95%	95%	95%	100%	
1.10.1.10.01.15.06	Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Jumlah jenis buku profil informasi kependudukan yang di terbitkan	5 buku	2 buku	1 buku	1 buku	100%	1 buku	4 buku	80%	
1.10.1.10.01.15.08	Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan	Jumlah masyarakat yang terlayani	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%	
1.10.1.10.01.15.10	Penyusunan Kebijakan Kependudukan	Jumlah qanun yang di susun	1 Qanun	0	0	0	0	1 Qanun	-	0%	
1.10.1.10.01.15.12	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Jumlah Aparat Gampong yang mengikuti sosialisasi	405 Orang	207 org	0	0	0%	198 Orang	405 Orang	100%	
1.10.1.10.01.15.16	Sosialisasi kebijakan Pencatatan Sipil	Jumlah Aparat Gampong yang mengikuti sosialisasi	550 Orang	220 Orang	110 orang	110 orang	100%	110 orang	440 orang	80%	

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out come)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra SKPD tahun (akhir periode Renstra SKPD 2022	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi kinerja program dan kegiatan SKPD tahun 2017 tahun lalu (n-2)			Target program dan Kegiatan Renja SKPD tahun (tahun n-1) 2020	Perkiraan realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d dengan tahun berjalan (2018)		Cat
					Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	(10)=(5+7+9)*	11 = (10/4)*	12
1.10.1.10.01.15.17	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Pencatatan Sipil	Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	30 kali	12 kali	6 Kali	6 Kali	100%	6 Kali	24 Kali	80%	
1.10.1.10.01.15.19	Penataan Dokumentasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumentasi arsip Kependudukan dan pencatatan sipil secara digital	60.000 Berkas	22.000 Berkas	11.500 Berkas	11.500 Berkas	100%	0	33.500 Berkas	55.83%	
1.10.1.10.01.15.21	Penataan Data Penduduk LAMPID	Jumlah buku Laporan data penduduk Lahir, Mati, Pindah, datang (LAMPID) yang diterbitkan	5 buku	2 buku	1 buku	1 buku	100%	1 buku	4 buku	80%	
1.10.1.10.01.15.11	Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan sipil	Jumlah aparat Gampong yang mendapatkan sosialisasi	99 orang	99 Orang	0	0	0%	0	99 Orang	100%	
1.10.1.10.01.15.23	Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Perjanjian Kerja sama terkait Akta Kelahiran	48 PKS	19 PKS	10 PKS	10 PKS	100%	10 PKS	39 PKS	81.25%	
1.10.1.10.01.15.27	Pelaksanaan kerjasama pemamfaatan data dengan instansi/lembaga	Jumlah Instansi/lembaga yang memamfaatkan data kependudukan	44 instansi/ lembaga	0	10 Instansi/ Lembaga	10 Instansi/ Lembaga	100%	10 Instansi/ Lembaga	20 Instansi/ Lembaga	45.45%	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yaitu melayani 23 jenis pelayanan yang meliputi :

1. Kartu Keluarga (KK)
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan Kartu Identitas Anak (KIA)
3. Surat Keterangan Pindah
4. Surat Keterangan Pindah Datang
5. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri
6. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri
7. Surat Keterangan Tempat Tinggal
8. Surat Keterangan Kelahiran
9. Surat keterangan Lahir Mati
10. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
11. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
12. Surat Keterangan Kematian
13. Surat Keterangan Pengangkatan Anak
14. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia
15. Surat Keterangan Pengganti Identitas
16. Surat Keterangan Pencatatan Sipil
17. Akta Kelahiran
18. Akta Kematian
19. Akta Perkawinan
20. Akta Perceraian
21. Akta Pengakuan Anak
22. Akta Pengesahan Anak
23. Data kependudukan

Berikut Tabel Capaian Kinerja Pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta Standar Pelayanan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Disdukcapil

No.	Indikator	SPM Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga			100%	100%	100%	100%	100%	97,77%	100%	100%	
2	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)			96.5%	97%	98%	98%	95.5%	99,75%	98%	98.5%	
3	Persentase Pasangan Berakta Nikah			65%	67,5%	70%	72,5%	65.42%	69,8%	70%	72.5%	
4	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 tahun			84.5%	86,5%	88.5%	90,5%	89.86%	93,5%	91%	92%	
5	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran			74%	76%	78%	80%	74.6%	74,6%	78%	80%	
6	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian			76%	78%	80%	82%	88%	86%	89%	90%	
7	Tingkat Kepuasan Masyarakat (TKM)			Nilai 87	Nilai 89	Nilai 89	Nilai 92	Nilai 90.86	Nilai 95,21	Nilai 91	Nilai 92	
8	Persentase Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil Secara Digital			82%	84%	86%	88%	82%	85%	86%	88%	
9	Persentase Peningkatan Akurasi Database Kependudukan			90%	92%	94%	96%	93%	81,52%	94%	96%	
10	Rasio Bayi Berakta Kelahiran			0.92	0.94	0.96	0.98	0.92	0,94	0.96	0.98	
11	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran			77%	79%	81%	83%	77%	74,6%	81.0%	83%	

Pada tabel 2.2 Terlihat kinerja Disdukcapil Kota Banda Aceh pada Tahun 2020 meningkat dalam pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh dokumen kependudukan. Hal ini terlihat pada cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Anak usia 0-18 tahun dengan target untuk tahun 2020 sebesar 86,5 %, pada akhir Tahun 2020 meningkat dengan capaian realisasi sebesar 93,5 %.

Untuk Tingkat Kepuasan Masyarakat (TKM) atas pelaporan dari target Nilai 89 Disdukcapil Kota Banda Aceh memperoleh Nilai 95,21 untuk realisasi Tingkat Kepuasan Masyarakat (TKM) Tahun 2020. Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa mutu dan kinerja pelayanan pada Disdukcapil Kota Banda Aceh berada pada Kategori Sangat Baik.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disdukcapil Kota Banda Aceh

2.3.1 Analisis Tingkat Kinerja

Disdukcapil Kota Banda Aceh saat ini sudah memiliki kantor pelayanan yang *representative* bertempat di Kantor Pelayanan Publik gedung Balaikota Banda Aceh sehingga masyarakat yang dilayani lebih nyaman dan aman pada saat pengurusan Dokumen Kependudukan maupun Pencatatan Sipil, dalam pelayanan kependudukan maupun pencatatan sipil sudah menggunakan Program SIAK versi 7.1 sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006.

Hal ini dapat dilihat dari hasil yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas diantaranya:

- Terlaksananya perekaman dan Pencetakan KTP el
- Tersedianya data base kependudukan dan pencatatan sipil
- Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil

- Terciptanya Kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait (Camat, Keuchik, Kepala Dusun dan instansi vertikal lainnya)
- Tersusunnya profil perkembangan kependudukan dalam bentuk buku
- Tersusunnya Buku Data Agregat Kependudukan
- Terlaksananya perjanjian kerjasama Pemanfaatan Data dengan OPD
- Terlaksananya penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
- Terlaksananya Perjanjian Kerjasama Pembuatan Akta Kelahiran dengan Rumah Sakit dan Klinik Bersalin
- Terpenuhinya kepemilikan Akta Kematian
- Tersosialisasinya masyarakat tentang kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil

2.3.2 Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi yang dihadapi oleh Disdukcapil Kota Banda Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah :

- 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pembuatan Akta Kematian;
- 2) Belum Adanya Tenaga yang khusus menangani bidang pengarsipan (Arsiparis);
- 3) Kurangnya Kesadaran masyarakat untuk membuat dan menyesuaikan data keluarga ke dalam KK terhadap kejadian vital (lahir, mati, datang dan pindah) ;
- 4) Blangko KTP elektronik masih diadakan oleh pusat;
- 5) Penghapusan data duplicate record masih tergantung di server pusat.

Selama masa Pandemi Covid-19 untuk pelayanan Kependudukan tetap berjalan lancar dan tidak ada kendala, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu menggunakan Mencuci tangan, memakai Hand Sanitiner dan Memakai Masker Selain pelayanan tatap muka, selama

pandemi Disdukcapil Kota Banda Aceh melakukan inovasi dengan memaksimalkan pelayanan secara online via website dan whatsapp.

2.3.3 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi

Bahwa dalam pelaksanaan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Banda Aceh, Disdukcapil terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan berpedoman kepada Peraturan-perundangan dan *Standard Operational Procedure* (SOP) yang telah di tetapkan, di samping itu juga melakukan upaya - upaya sebagai berikut :

- Melakukan Pelayanan Sistem Jemput Bola/door to door untuk pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ke gampong-gampong, sekolah-sekolah, Kampus, Panti Jompo, Lembaga Perasyarakatan (LP), Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Jiwa;
- Melakukan sosialisasi kepada Masyarakat melalui Media Massa, Baliho, Brosur, Talk show;
- Melakukan sosialisasi kepada Aparat Gampong dan Kecamatan;
- Perbaiki data dengan melakukan pemutakhiran data penduduk
- Meningkatkan kualitas SDM melalui Bimtek baik tingkat propinsi maupun pusat.

Berkenaan dengan hal yang telah diuraikan diatas serta upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Disdukcapil maka permasalahan diatas tidak berdampak kepada pencapaian visi dan misi Walikota Banda Aceh.

2.3.4 Tantangan dan Peluang

➤ Tantangan

- 1) Adanya persepsi masyarakat tentang sulitnya pengurusan Administrasi Kependudukan;
- 2) Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 3) Masih adanya kewenangan yang belum sepenuhnya diberikan Pusat ke Daerah menyangkut Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

➤ Peluang

- 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan;
- 2) Adanya dukungan dari Kepala Daerah, pimpinan, pihak kecamatan dan aparat gampong dalam pelaksanaan penertiban administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- 3) Adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan Administrasi kependudukan

Dari kondisi yang tergambar di atas, dalam upaya untuk pencapaian tujuan terpenuhinya pelayanan yang prima kepada masyarakat dalam wilayah Kota Banda Aceh, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan tenaga operator yang ada;
- 2) Mengirimkan operator untuk mengikuti pendidikan/pelatihan penguatan kapasitas;
- 3) Mengajukan penambahan operator;
- 4) Perbaikan database telah dilakukan dengan pemutakhiran data penduduk;
- 5) Melakukan sistem jemput bola/*door to door* dalam rangka percepatan kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di gampong, sekolah-sekolah, Kampus Panti Jompo, Rumah Sakit, Klinik Bersalin dan Lembaga Permasyarakatan (LP) dalam Wilayah Kota Banda Aceh;
- 6) Meningkatkan peran Camat/Keuchik/Kepala lingkungan/tokoh masyarakat dalam percepatan kepemilikan dokumen kependudukan;
- 7) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk sinkronisasi data kependudukan;
- 8) Melakukan *back up* data kependudukan setiap hari;
- 9) Melakukan publikasi/sosialisasi kepada masyarakat melalui media massa, baliho, brosur, penyuluhan, *talkshow* dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan;

- 10) Melakukan Kerja dengan Rumah sakit, Klinik bersalindan Bidan untuk percepatan penerbitan Akta Kelahiran;
- 11) Melakukan kerjasama dengan OPD untuk pemanfaatan Data Kependudukan;
- 12) Telah membuka Counter pelayanan kependudukan di MPP Kota Banda Aceh sejak tanggal 3 Desember 2019.

4.3.5 Formulasi isu-isu penting

Formulasi isu-isu penting dalam hal ini berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2021.

Berbagai isu strategis yang berkembang dan perlu mendapat perhatian dalam rangka peningkatan Disdukcapil antara lain:

- a. Tingginya tuntutan pelayanan publik yang berkualitas berdasarkan sistem dan prosedur yang jelas;
- b. Pelaksanaan kegiatan harus berdasarkan aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Diperlukan efisiensi anggaran dan efektifitas kinerja.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA DISDUKCAPIL

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945 dan didasarkan oleh Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan visi Indonesia tahun 2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.

Hubungan antara Kebijakan Pembangunan Nasional dengan Kebijakan Pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional dengan
Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah
1. Ekonomi	1. Pemahaman dan pengamalan Syariat islam
2. Lingkungan	2. Infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup
3. Politik	3. Ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan
4. Hukum	4. Pendidikan, pemuda dan olah raga
5. Pertahanan dan Keamanan	5. Kesehatan
6. Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	6. Tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi
7. Kesejahteraan	7. Pariwisata, seni dan budaya
8. Kewilayahan	8. Pengarusutamaan gender (PUG)
9. Kelautan	

Adapun arah kebijakan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajibannya berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan
2. Menyediakan data dan informasi kependudukan mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara akurat, lengkap dan update yang mudah diakses oleh masyarakat sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan pembangunan pada umumnya.
3. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara Nasional dan terpadu

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh adalah “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan”

Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan sasaran yang harus dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh dalam rangka pelaksanaan realisasi visi dan misi, adapun sasarannya adalah “ Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan, kualitas Pelayanan dan tersedianya data base yang akurat”.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi SKPD dalam merealisasikan perencanaan pembangunan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Seiring terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terjadi perubahan mendasar terkait kodefikasi dan nomenklatur. Salah satu yang menonjol adalah munculnya Sub Kegiatan, merupakan nomenklatur aktivitas dari kegiatan.

Pada tahun 2021, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh adalah :

➤ **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan : Administrasi Keuangan

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan : Administrasi Umum

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Makanan dan Minuman;
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah;

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung/ Kantor.

Kegiatan : Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber daya Aparatur

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.

➤ **Program Pendaftaran Penduduk**

Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
- Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan

➤ **Program Pencatatan Sipil**

Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil

- Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
- Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

➤ **Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data Base

- Pengumpulan, Analisis dan Desiminasi Perkembangan Penduduk
- Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan

- Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat

➤ **Program Pengelolaan Profil Kependudukan**

Kegiatan : Penyusunan Profil Kependudukan

- Penyusunan Profil data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain.

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh Tahun 2021
dan Perkiraan Maju Tahun 2022 Kota Banda Aceh**

Kode	urusan	indiator	rencana				catatan Penting	prakiraan	
			lokasi	target capaian kinerja	kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	sumber Dana		target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				7,565,668,632				7,819,127,932
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah		100%	6,326,224,832			100%	6,455,739,752
2.12.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		100%	5,000,000	APBK		100%	5,500,000
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan renja Perangkat daeah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	5 Dokumen	5,000,000	APBK		5 Dokumen	5,500,000
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan	Jumlah Anggaran yang tersedia		12 Bulan	5,031,075,632			12 Bulan	5,031,075,632
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12 Bulan	4,562,845,632	APBK		12 Bulan	4,562,845,632
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu jasa administrasi dan pelaksanaan tugas ASN yang disediakan	Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12 Bulan	468,230,000	APBK		12 Bulan	468,230,000
2.12.01.2.03	Administasi Umum	Terlaksananya Administrasi Perkantoran		100%	1,290,149,200	APBK		100%	1,419,164,120
2.12.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Jumlah waktu jasa, komunikasi, SDA dan listrik yang di sedikan	Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12 Bulan	35,620,000	APBK		12 Bulan	39,182,000
2.12.01.2.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang di sediakan	Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	8 Jenis	257.000.000	APBK		8 Jenis	282.700.000

2.12.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah waktu Jasa kebersihan kantor yang disediakan	Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12 Bulan	2,694,000	APBK		12 Bulan	2,963,400
2.12.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	51 Jenis	346,098,000	APBK		51 Jenis	380,707,800
2.12.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	13 Jenis	37,284,000	APBK		13 Jenis	41,012,400
2.12.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantorang di sediakan	Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	7 Jenis	1,749,000	APBK		7 Jenis	1,923,900
2.12.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makanan dan minuman yang disediakan	Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	11.616 Porsi	194,191,200	APBK		11616 Porsi	213,610,320
2.12.01.2.03.18	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	30 Laporan	328,437,000	APBK		30 Laporan	361,280,700

2.12.01.2.03.20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	tersedianya kendaraan Dinas/Operasional	Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1 Unit	15,000,000	APBK		1 Unit	16,500,000
2.12.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional yang dilaksanakan	Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	48 Kali	53,875,000	APBK		48 Kali	59,262,500
2.12.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang dilaksanakan	Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	75 Kali	18,201,000	APBK		75 Kali	20,021,100
2.12.01.2.04	Peningkatann Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Tingkat Kedisiplinan Aparatur Perangkat Daerah	Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100%	-	APBK		100%	-
2.12.01.2.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang disediakan	Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	0 stell	-	APBK		0	-

2.12.02	Program Pendaftaran penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	97,50%	938,734,500	APBK		97,50%	1,032,607,950
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kependudukan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100%	938,734,500	APBK		100%	1,032,607,950
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Arsip Kpendudiukan dan Pencatatan Sipil yang sitata	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	980 dokumen	37,012,000	APBK		980 dokumen	40,713,200
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	86%	843,225,000	APBK		86%	927,547,500
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen tas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah penduduk Non permanen yang terdata	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	500 Orang	58,497,500	APBK		500 Orang	64,347,250
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	86.50%	102,000,800	APBK		86.50%	112,200,880
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	86.50%	102,000,800	APBK		86.50%	112,200,880
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan peristiwa penting	Jumlah Sosialisasi tentang permasalahan pencatatan sipil yang dilaksanakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	6 kali	53,126,500	APBK		6 kali	58,439,150
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Perjanjian Kerjasama terkait Akta Kelahiran	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	8 PKS	48,874,300	APBK		8 PKS	53,761,730

2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyajian Data Kependudukan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	94%	149,982,500	APBK		94%	164,980,750
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Tersedia Aplikasi Pelayanan Kependudukan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100%	105,760,000			100%	116,336,000
2.12.04.2.01.03	Pengumpulan, Analisis dan Diseminasi Perkembangan Penduduk	Tersedia Aplikasi Pelayanan Kependudukan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1 Aplikasi	48,212,500			1 Aplikasi	53,033,750
2.12.04.2.01.05	Kerja Sama pemanfaatan data Kependudukan	Jumlah Instansi/Lembaga yang Memanfaatkan data Kependudukan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	10 Instansi/lembaga	57,547,500			10 Instansi/lembaga	63,302,250
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Tertatanya Administrasi Pencatatan Sipil	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100%	44,222,500			100%	48,644,750
2.12.04.2.03.10	Komunikasi, Informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Aparat Gampong yang mengikuti sosialisasi	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	110 Orang	44,222,500	APBK		110 Orang	48,644,750
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	Banda Aceh	100%	48,726,000			100%	53,598,600
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Menyajikan Profil Kependudukan Berskala Kab/Kota	Banda Aceh	100%	48,726,000			100%	53,598,600
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil data Perkembangan Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Jenis Buku Profil Informasi Kependudukan yang diterbitkan	Banda Aceh	3 buku	48,726,000			3 buku	53,598,600

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISDUKCAPIL

Untuk mewujudkan visi dan misi menuju Kota Banda Aceh Gemilang dalam bingkai Syari'ah diperlukan strategi yang tepat agar program kebijakan dapat berjalan dengan baik, salah satu strategi yang tepat untuk digunakan dalam mencapai keberhasilan kebijakan adalah dengan sistem perencanaan yang komperhensif, realistis, akuntabel, dan transparan. Akan tetapi sistem perencanaan yang sudah baik tanpa dimplementasikan dengan cermat juga akan menjadi penghambat pelaksanaan program kegiatan. Untuk itu perencanaan yang baik perlu juga didukung dengan implementasi kebijakan selaras dengan perencanaan, karena sebuah kebijakan merupakan siklus yang saling memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya maka perencanaan yang sudah baik didukung dengan implementasi yang cermat dan tepat maka selanjutnya diperlukan monitoring dan evaluasi untuk menentukan indikator keberhasilan program kebijakan melalui monitoring dan evaluasi akan diketahui tingkat keberhasilan dan hambatan dalam program kebijakan.

Sebagaimana di ketahui bahwa kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan atau petunjuk bagi setiap pelaksana kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan masyarakat sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategi berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi. Program dan kegiatan berdasarkan urusan yang ditangani oleh Disdukcapil Kota Banda Aceh disajikan pada tabel 4.1 berikut :

Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target		Pagu	Kelompok Sasaran
							Volume	Satuan		
1				2	3	4	5	6	7	8
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2.1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
2.12	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	%	6,326,224,832	Disdukcapil
2.12	01	2	01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	%	5,000,000	Disdukcapil
2.12	01	2	01	01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun	Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	5	Dokumen	5,000,000	Disdukcapil
2.12	01	2	02		Administrasi Keuangan	Banda Aceh, Baiturrahman,	12	Bulan	5,031,075,632	Disdukcapil
2.12	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan ASN	Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12	Bulan	4,562,845,632	Disdukcapil
2.12	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12	Bulan	468,230,000	Disdukcapil
2.12	01	2	03		Administrasi Umum	Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	%	1,290,149,200	Disdukcapil
2.12	01	2	03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12	Bulan	35,620,333	Disdukcapil

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target		Pagu	Kelompok Sasaran
								Volume	Satuan		
1					2	3	4	5	6	7	8
2.12	01	2	03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan	Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	8	Jenis	257,000,000	Disdukcapil
2.12	01	2	03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Waktu Jasa Kebersihan Kantor yang Disediakan	Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12	Bulan	2,694,000	Disdukcapil
2.12	01	2	03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan	Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	51	Jenis	346,098,000	Disdukcapil
2.12	01	2	03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	13	Jenis	37,284,000	Disdukcapil
2.12	01	2	03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	7	Jenis	1,749,000	Disdukcapil
2.12	01	2	03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan	Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	11.616	Porsi	194,191,200	Disdukcapil

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target		Pagu	Kelompok Sasaran
				Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.12 01 2 03 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	Jumlah laporan Rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	30	Laporan	328,437,000	Disdukcapil
2.12 01 2 03 20	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Unit	15,000,000	Disdukcapil
2.12 01 2 03 30	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional yang dilaksanakan	Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	48	Kali	53,875,000	Disdukcapil
2.12 01 2 03 34	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung kantor yang dilaksanakan	Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	75	Kali	18,201,000	Disdukcapil
2.12 01 2 04	Peningkatan Disiplin dan kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase Tingkat Kedisiplinan Aparatur Perangkat Daerah	Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	%	-	Disdukcapil
2.12 01 2 04 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang disediakan	Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	0	Stell	-	Disdukcapil

Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target		Pagu	Kelompok Sasaran
							Volume	Satuan		
1				2	3	4	5	6	7	8
2.12	02			Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	97.50	%	938,734,500	Disdukcapil
2.12	02	2	01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	%	938,734,500	
2.12	02	2	01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumentasi Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditata	980	Dokumen	37,012,000	Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12	02	2	01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	86	%	843,225,000	Penduduk Kota Banda Aceh
2.12	02	2	01	04	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Penduduk Non Permanen yang terdata	500	Orang	58,497,500	Penduduk Kota Banda Aceh
2.12	03			Program Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	86,50	%	102,000,800	
2.12	03	2	01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	86.50	%	102,000,800	Peningkatan Pelayanan
2.12	03	2	01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Sosialisasi tentang Permasalahan Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	6	Kali	53,126,500	Instansi Lintas Sektoral
2.12	03	2	01	02	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Perjanjian Kerjasama terkait Akta Kelahiran	8	PKS	48,874,300	RS, Klinik

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target		Pagu	Kelompok Sasaran
								Volume	Satuan		
1					2	3	4	5	6	7	8
2.12	04				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyajian data kependudukan	Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	94%	%	149,982,500	Disdukcapil
2.12	04	2	01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemamfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Tersedianya Aplikasi Pelayanan Kependudukan	Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	%	105,760,000	Disdukcapil
2.12	04	2	01	03	Pengumpulan, Analisis dan Diseminasi perkembangan penduduk	Tersedianya Aplikasi Pelayanan Kependudukan	Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Aplikasi	48,212,500	Masyarakat Kota Banda Aceh
2.12	04	2	01	05	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Instansi/Lembaga yang memanfaatkan Data Kependudukan	Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	10	Instansi/Lembaga	57,547,500	SKPD
2.12	04	2	03		Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Tertatanya Administrasi Pencatatan Sipil	Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	%	44,222,500	
2.12	04	2	3	10	Komunikasi, Informasi, dan edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Aparat gampong yang mengikuti Sosialisasi	Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	110	Orang	44,222,500	Aparat gampong
2.12	05				Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan		10000%	%	48,726,000	
2.12	05	2	01		Penyusunan Profil Kependudukan	Menyajikan Profil Kependudukan berskala Kab/Kota	Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	%	48,726,000	Akurasi database
2.12	05	2	01	02	Penyusunan Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Jenis Buku Profil Informasi Kependudukan yang diterbitkan	Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	3	Buku	48,726,000	Gampong, Kec, dan Instansi Terkait

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh Tahun 2021 yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan program dan kegiatan untuk tahun yang akan datang. Keberhasilan dalam mewujudkan Visi dan Misi Walikota Banda Aceh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh diperlukan dukungan berupa komitmen dari kepemimpinan yang cakap, berkualitas dan demokratis serta adanya partisipasi dari masyarakat secara aktif.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh adalah program tahunan yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2021 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan adanya Rencana Kerja ini diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh serta seluruh aparaturnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat mudah, cepat dan transparan.

Banda Aceh, 13 Oktober 2020

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh



Dra. Emila Sovayana
Pembina Utama Muda
Nip. 197406041993022001